

LEDAKAN PENDUDUK PERKOTAAN RIAU: PERLU ANTISIPASI

Deliarnov*

Abstract: As an impact of the high investment rate lately, the average economic growth of Riau in general and Pekanbaru city particularly is much higher than the national average economic growth. The high economic growth is also influenced by higher budget that is organised by local government as a result of the local autonomy implementation. On the other hand, the economic growth is suspected to cause higher rate of people's growth in Riau urban areas, which is mainly because of higher urbanisation flow. This will lead to further problems such as the higher need of public facilities (i.e. electricity, drinking water, transportation, communication, education, health, recreation, sport facilities, etc). Furthermore, as more people to come, the problems become more complicated. For example, more complicated living environment, traffic jam, unemployment problems, informal traders, environmental problems (pollution, noise), and also complicated social diseases such as criminals, gambling, prostitutions and so on. Those problems need to be handled wisely and this should be done through integrated and holistic regulations.

Keywords: *Economic Growth, Local Autonomy, People's Growth, Urbanisation, Urban Facilities, Urban Problems, Urban Regulation.*

Pendahuluan

Dari literatur kita mengetahui bahwa terbentuknya kota erat kaitannya dengan kemajuan ekonomi suatu kelompok masyarakat. Pada tahap awal perkembangan masyarakat biasanya perekonomian dicirikan oleh bentuk perekonomian tertutup sederhana dengan corak *self-sufficiency*. Dengan majunya pertanian aktivitas konsumsi mulai terpisah dari aktifitas produksi, dan masyarakat mulai hidup mengelompok. Di Eropa bentuk komunal yang pertama berbentuk *manorial*, yang dapat dianggap sebagai suatu entitas sosial, ekonomi dan politik. Pimpinan *manor* tidak hanya bertindak sebagai pelindung, hakim, polisi, tapi juga sebagai administrator di wilayahnya. Pusat *manor* adalah *castle*, diisi oleh tuan tanah (*lanlord*) dan para hamba (*serfdom*) untuk memenuhi keperluan *landlord* dan keluarganya.

Sistem *Manorial* lama kelamaan rontok dengan ditemukannya uang sebagai alat tukar dan makin majunya dunia perdagangan. Sebahagian hamba yang tidak ingin diperbudak melarikan diri, dan agar dapat bertahan hidup mereka melakukan aktivitas perdagangan. Pada awalnya pedagang termasuk warga negara kelas tiga. Mereka bahkan sering disebut *pieds-podreux* (istilah Perancis) atau *dusty feet* (istilah Inggris), yang dalam bahasa Indonesia berarti "kaki kotor". Rendahnya status pedagang tidak hanya dijumpai pada masyarakat abad pertengahan di Eropa. Di tanah air zaman "tempoe doeloe" kedudukan pedagang juga rendah, terutama pada masyarakat Jawa. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa warga menggunakan bahasa *ngoko* jika berbicara dengan pedagang.

Walaupun status pedagang hina pada awalnya, tetapi sesungguhnya peran mereka

* Dosen Fakultas Ekonomi-Unri, Staf Peneliti pada Pusat Penelitian Industri dan Perkotaan (PIIP) Unri, dan mengajar mata kuliah "Ekonomi Perkotaan" pada Pasca Sarjana Universitas Riau Program Studi Sosiologi

besar sekali. Karena jasa merekalah para *celebrities* di Eropa zaman pertengahan menikmati kain-kain bermutu tinggi seperti sutra dari Cina atau Sari dari India, serta rempah-rempah dari Nusantara. Peran mereka semakin penting jika dikaitkan dengan pembangunan perkotaan. Kenyataannya dari aktivitas pedaganglah muncul "bazaar", "fair", yang akhirnya memunculkan "gilde", *urban* dan *city*, bahkan juga *metropolis* dan *mega-urban*.

Sama seperti terbentuknya kota-kota lain di dunia, perkembangan kota-kota di Riau seperti Pekanbaru, Dumai, Pangkalan Kerinci, Bagan Batu dan sebagainya juga tidak lepas dari peran pedagang. Untuk kota Pekanbaru misalnya, berkat kaum pedaganglah Payung Sekaki yang awalnya hanya berupa pasar (tepatnya pekan) berubah menjadi Senapelan dan akhirnya menjelma menjadi kota Pekanbaru seperti sekarang.

Sejarah membuktikan bahwa sebuah kota biasanya akan maju jika memperlakukan pedagang dengan baik. Kalau kota tersebut tidak aman, atau menerapkan terlalu banyak aturan sehingga merugikan pedagang, maka pedagang akan memilih berjualan ke tempat lain. Dalam bahasa manajemen modern sekarang, jika pemerintah kota tidak menciptakan iklim usaha yang kondusif, tidak ada *law enforcement*, maka pebisnis atau calon investor yang ada bisa merelokasi bisnisnya ke tempat lain.

Definisi

Istilah kota (*city*) dan perkotaan (*urban*) sering disamakan artinya. Hal ini tidak tepat. Menurut World bank dalam *Cities in Transition* (2000), *city is a legal designation associated with specific administrative or local government structures*. Di Indonesia kota dibedakan atas kota kecil (penduduk antara 5.000 – 50.000), kota sedang (penduduk antara 50.000 – 500.000) dan kota besar (penduduk melebihi 500.000). Sesuai definisi di atas maka Pekanbaru yang berpenduduk sebanyak 582.240 pada tahun 2000 dapat dikategorikan

sebagai kota besar.

Disisi lain definisi tentang perkotaan (*urban*) berbeda menurut negara dan waktu. (*Definition of urban varies by country and overtime, normally referring to settlements with a minimum population ranging from 2.500 to 25.000 people and with a certain concentration of nonagricultural employment and production*).

Selain istilah kota dan perkotaan, juga ada istilah urbanisasi, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai perubahan dalam proporsi penduduk nasional yang bermukim di kota-kota (*urbanization is defined as the change in the proportion of the national population residing in urban areas*). Biasanya pertumbuhan perkotaan mengindikasikan perubahan dalam ukuran penduduk perkotaan yang independen terhadap perubahan dalam populasi penduduk pedesaan (*Urban growth indicates the change in urban population size, independent of change in the rural population*).

Kota dapat diartikan sebagai konsentrasi berbagai aktivitas (ekonomi, politik, sosial, hukum, budaya, pendidikan, dll) dalam suatu tata ruang tertentu. Ditinjau dari sudut pandang ekonomi adanya kota disebabkan karena adanya *scale economies* (lebih efisien melayani permintaan besar) dan *comparative advantage* (lebih efisien dalam memproduksi) serta faktor *amenities* (kemudahan) lainnya.

Biasanya makin banyak orang datang ke sebuah kota, makin banyak pula sarana dan prasarana serta fasilitas yang diperlukan, mulai dari penyediaan listrik, air minum, transport, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, olahraga, dan lain sebagainya. Penyediaan semuanya memerlukan dana yang tidak sedikit.

Selain itu makin banyak yang datang ke kota, makin pelik masalah yang dihadapi, mulai dari masalah pengangguran, masalah lingkungan pemukiman; masalah lalu lintas (*congestion*); masalah lingkungan (polusi, keributan); masalah "pekat" (kejahatan, judi, pelacuran) dan sebagainya.

Untuk mengatasi berbagai masalah perkotaan tersebut maka Pemko kota-kota yang ada di Riau harus makin arif dan bijaksana. Diperlukan adanya suatu kebijaksanaan menyeluruh (holistik) yang terpadu dengan mempertimbangkan semua *stake-holders* yang terkait. Kebijakan yang diambil seyogyanya didasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep yang dijumpai dalam Ekonomi Perkotaan, yaitu salah satu cabang ilmu Ekonomi yang khusus membicarakan analisis ekonomi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kota dalam perkembangannya. Kebijakan diambil dengan mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi di kota-kota yang ada di Riau.

Pertumbuhan Penduduk

Thomas Malthus dalam "*Essays on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society*" (1798) sudah lama memperingatkan akan dahsyatnya dampak pertumbuhan penduduk. Menurut Malthus, manusia berkembang sesuai *geometric progression* (Deret Ukur) sedang produksi makanan meningkat sesuai *arithmetic progression* (Deret Hitung). Jika pertumbuhan penduduk tak terkendali bisa menimbulkan bencana (*disaster*).

Menurut Malthus sesuai teori "hari kiamat" (*The Doomsday Theory*): agar umat manusia bisa terhindar dari malapetaka (*disaster*) maka perlu dilakukan pembatasan moral (yang sekarang dikenal dengan istilah Keluarga Berencana atau KB). Kalau tidak, maka sesuai dengan teori keseimbangan klasik yang sifatnya *self correcting*, alam akan menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri! Bagaimana caranya alam menyelesaikan masalah? Bisa dalam bentuk banjir, kemarau, perang atau konflik antar-etnis, antar-ras, antar-suku dan sebagainya. Melihat begitu banyaknya masalah yang dihadapi umat manusia saat ini, tidak terkecuali di Indonesia yang makin sering dilanda banjir, kemarau, konflik antar etnis,

perampokan, penjarahan dan sebagainya, ada yang beranggapan bahwa ramalan Malthus sudah semakin mendekati kenyataan.

Anehnya dalam kasus pincangnya pertumbuhan penduduk dengan produksi ini manusia tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Sebagaimana yang ditulis Malthus dalam *Essays on the Principles of Population* (1798): "*When the wage of labor are hardly sufficient to maintain two children, a man marries and has five or six. He of course finds himself miserably distressed. He accuses the insufficiency of the price of labor to maintain a family....He accuses the partial and unjust situations of society.... The last person that he would think of accusing is himself, on whom in fact the whole of the blame lies...*"

Gejala seperti yang diramal Malthus dalam "*The Doomsday Theory*"nya makin sering kita saksikan dalam kehidupan. Tetapi penduduk dunia justru bertambah dalam laju peningkatan yang semakin meningkat saja. Dari masa ke masa tambahan penduduk 1 milyar diperoleh dalam waktu lebih singkat. Jumlah penduduk 1 milyar dicapai pada awal abad ke-18. Ini berarti dibutuhkan puluhan ribu tahun untuk "menciptakan" sebanyak 1 milyar penduduk. Tetapi dari jumlah penduduk 1 milyar pertama ke milyar kedua hanya perlu waktu 123 tahun. Bahkan dari jumlah penduduk 2 milyar ke 3 milyar hanya perlu 33 tahun. Untuk tambahan 1 milyar selanjutnya hanya perlu waktu 14, 13 dan 11 tahun. Pada tahun 2000 jumlah penduduk dunia ditaksir sudah melebihi 6 milyar.

Mengantisipasi ledakan penduduk dunia tersebut, maka dalam *International Conference on Population and Development* tanggal 5-13 September 1994 di Kairo, PBB menyatakan tahun 1994 sebagai "tahun kependudukan". PBB juga mengeluarkan pernyataan: "bumi telah sampai - di beberapa tempat malahan sudah melewati - kemampuan daya dukungnya".

Suatu hal yang perlu dicatat, pertumbuhan penduduk paling tinggi terjadi

di kota-kota. Tahun 1950 terdapat 83 kota dengan penduduk di atas 1 juta. Sekarang tidak kurang dari 300 kota berpenduduk di atas 1 juta. Karena penduduk di kota-kota lebih cepat tumbuh dibanding di daerah pedesaan, maka PBB memperkirakan bahwa jumlah penduduk perkotaan akan sama dengan jumlah penduduk pedesaan tahun 2007, dan pada tahun 2010 mayoritas populasi dunia akan tinggal di kota-kota. Jumlah *megacity* dengan penduduk di atas 10 juta naik dari 6 menjadi 19 dalam 40 tahun terakhir, termasuk di dalamnya kota-kota “super sumpek” seperti

Lagos, Karachi, dan Mumbai.

Dibanding belahan bumi lainnya, pertumbuhan penduduk perkotaan cukup tinggi di Asia Tenggara (3,5 persen). Sebagai perbandingan, pertumbuhan penduduk perkotaan di Cina hanya 2,4 persen, dan di India hanya 2,8 persen. Adapun pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata Asean, yaitu sebesar 3,8 persen. Angka pertumbuhan penduduk perkotaan Indonesia tersebut nomor 3 tertinggi di ASEAN sesudah Laos (4,9 persen) dan Kamboja (4,3 persen). Lihat Tabel 1.

Tabel 1: Perbandingan Penduduk Perkotaan di Asia Tenggara

Country	Mid-2001 Population	Percentage Urban Pop	Annual Growth Rate	Projected % Urban in 2025
China	1.285 juta	33	2,4	47
India	1.025	29	2,8	43
ASEAN:	529	38	3,5	53
▶ Brunei D	0,346	73	2,6	81
▶ Cambodia	13,4	16	4,3	29
▶ Indonesia	214,8	42	3,8	61
▶ Laos	5,4	24	4,9	39
▶ Malaysia	23,6	58	3,0	71
▶ Myanmar	48,4	28	2,8	43
▶ Filipina	77,1	59	3,3	72
▶ Singapore	4,1	100	3,2	100
▶ Thailand	62,9	22	2,6	36
▶ Vietnam	79,2	24	3,6	30

Sumber: 2001 ESCAP Population Data Sheet.

Penduduk Riau

Laju pertumbuhan penduduk Riau termasuk yang tertinggi di Indonesia. Secara dramatis jumlahnya naik dari 1.641.074 jiwa tahun 1971 menjadi 2.281.896 jiwa tahun 1980; 3.278.807 tahun 1990; dan 4.733.948 jiwa tahun 2000. Laju pertumbuhan penduduk tahun 1990-2000 adalah 3,8 persen. Jumlah ukuran rumah tangga rata-rata adalah 4,09 jiwa.

Dari jumlah penduduk total tahun 2000 sebanyak 2.405.282 adalah laki-laki, dan 2.328.665 perempuan. Dari jumlah

penduduk, sebanyak 474.027 berusia di bawah 5 tahun (0 – 4 tahun); 3.004.181 usia produktif (15 – 59 tahun); dan 194.195 di atas 60 tahun. Sekitar 56,2 persen dari populasi usia produktif hanya berpendidikan sekolah dasar.

Walau Riau tidak mengalami dampak yang sangat parah pada saat Indonesia ditimpa krisis tahun 1997-1999, tetap saja jumlah penduduk miskin bertambah, baik dalam artian absolut maupun relatif. Lebih jelas, jumlah penduduk miskin naik dari 33,14 % tahun

1998 jadi 42,25 % tahun 1999; 44,85 % tahun 2000; dan sekitar 43 % tahun 2001. Jumlah penganggur terbuka diperkirakan 6,1 % tahun 2000.

Di beberapa kota yang ada di Riau, ternyata jumlah penduduk migran cukup besar. Secara rata-rata jumlah penduduk migran berusia 5 tahun atau lebih tahun 2000 adalah 44,7 % . Jumlah penduduk migran tertinggi dijumpai di kota Batam, yaitu 82,94 %; diikuti oleh Dumai 77,32 %; Siak 65,81 %; P.Baru 59,08 %; Pelalawan 54,78 %. Sedang kota-kota yang relatif kecil jumlah penduduk

migrannya adalah Bengkalis, yaitu 26,53 %; Inhil 22,25 %; dan Natuna 9,36 %. Dari berbagai kota yang ada, kota-kota yang paling laju pertumbuhan penduduknya di Riau adalah Batam, Pekanbaru, dan Pangkalan Kerinci.

Menurut hasil perhitungan sementara PPIP (2002), sesuai data dan kecenderungan yang ada, diperkirakan jumlah penduduk Riau berkisar antara 8 juta (perkiraan pesimis) hingga 10 juta (perkiraan optimis) tahun 2020. Lihat Tabel 2.

Sumber: PPIP (2002).

Tabel 2. Proyeksi Penduduk Riau Tahun 2020

RATE OF GROWTH	Asumsi 2000	Asumsi – Asumsi Tahun 2020			
		SSDP	SSDP-IG	SEG-WSDP	SEG-WSDP-UI
TFR	2,64 %	2 %	2 %	2,5 %	2,75 %
IMR	3,52 %	1,6	1,16	2,4	2,4
IR	2,00 %	0,46	0,5	0,5	2,0
TGR	3,95 %	1,79	0,83	2,24	4,03
	Pop 2020	7.967	7.926	8.982	10.146

Keterangan:

- TFR = Total Fertility Rate
- IMR = Infant Mortality Rate
- IR = Immigration Rate
- TGR = Total Growth Rate
- SSDP = Strong Social Development Policies @ Main Scenario
- SSDP-IG = Strong Social Development Policies-Indigenous Growth
- SEG-WSDP = Strong Economic Growth'03-10 - Weak Social Development
- SEG-WSDP-UI = Strong Economic Growth'03-20 –Weak Social Development Policies-Urban Influx

Dampak Urbanisasi

Mengapa terjadi migrasi dari desa-desa ke kota-kota? Hal ini tidak terlepas dari adanya faktor penarik (“*pull-factors*”) seperti harapan bisa mencari kerja lebih mudah di kota dan bahwa di kota fasilitas lebih lengkap (pendidikan, kesehatan, dll). Sedang faktor pendorongnya (“*push factors*”) ialah karena lapangan pekerjaan makin sempit di desa-desa, dan kenyataan fasilitas di desa yang serba

kurang.

Tentang *push factors*, adalah fakta tak terbantahkan bahwa Nilai Tukar Petani tak pernah beranjak naik. Di Riau, hal ini dapat dilihat dari makin rendahnya nilai tukar karet, kelapa, hasil perikanan, dan kemungkinan hal ini juga akan dialami oleh komoditas kelapa sawit dimasa-masa yang akan datang. Menurut Chris Manning (1988), bahkan Revolusi Hijau belum mampu melahirkan peluang kerja di

pedesaan. Dalam kenyataan justru peluang kerja di pedesaan diciptakan oleh proyek-proyek Pekerjaan Umum. Hal senada disampaikan oleh G.W.Jones (1983): walau perbaikan sarana dan prasarana pertanian digalakkan, namun perluasan industrialisasi tetap terpusat di kota-kota.

Tentang dampak urbanisasi bagi perekonomian dan pembangunan, agaknya sudah terjadi perubahan paradigma. Pada awalnya ekonom menganggap migrasi dari desa ke kota sebagai suatu hal yang positif, alamiah, bersumber dari tak imbangnya struktur dan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Sesuai *theory of labor transfer* Arthur Lewis, migrasi internal adalah proses alamiah untuk menyalurkan *surplus* tenaga kerja (*labor*) dari tempat-tempat yang produktivitas marginal sosialnya rendah (pertanian-pedesaan) ke tempat-tempat yang produktivitas marginal sosialnya tinggi (kota-industri). Teori Lewis diatas dianggap sebagai pemicu tingginya urbanisasi. Tetapi yang terjadi, jangankan memacu industrialisasi di perkotaan, migrasi dari desa ke kota justru menimbulkan masalah pengangguran dan berbagai dampak sosial negatif lainnya.

Jika dikelola dengan baik, kota memang berpotensi memperbaiki kualitas hidup manusia (mencari rezeki, memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan derajat kesehatan, memberdayakan manusia memenuhi kebutuhan hidup). Dampak positif dari sisi ekonomi ialah terciptanya skala ekonomis raksasa, sehingga efisien dalam produksi, pemasaran, penyelenggaraan pelayanan fasilitas sosial, sumber tenaga kerja trampil yang sangat besar. Kota memiliki modal, buruh dan pasar bagi pengusaha/innovator dari berbagai lapis kegiatan ekonomi. Nyatanya kota-kota pada banyak negara-negara berkembang secara rata-rata memberikan sumbangan 60 – 80 persen dari GNP (Maria Hartiningsih, 1996).

Tapi potensi biaya sosialnya bisa lebih besar dari keuntungan ekonomis yang diperoleh. Jika kota tidak dikelola dengan

baik, yang terjadi adalah makin tingginya tingkat kriminalitas, pencemaran lingkungan, dan macetnya lalu lintas. Artinya, yang dijumpai bukan solusi, melainkan justru masalah, dimana penduduk desa yang datang ke kota-kota justru menjumpai kesengsaraan. Kalau pada awalnya para migran datang ke kota dengan setumpuk harapan yang indah-indah, nyatanya kehidupan di perkotaan mendera kehidupan, menyebabkan frustrasi, atau memperoleh penyakit perkotaan. Urbanisasi yang terlalu tinggi bisa menyebabkan terjadinya "pembunuhan" lahan pertanian, budaya, dan sejarah (misalnya tergusurnya tempat-tempat bersejarah seperti Hotel Des Indes, Hotel der Nederlanden, Societe de Harmonie di Menteng, Jakarta).

Tantangan pembangunan perkotaan masa depan adalah: bagaimana melanjutkan kemajuan yang dicapai dalam pembangunan sosial di tengah-tengah tekanan yang amat besar. Sebab, meski ekonomi terus bertumbuh, jumlah penduduk miskinnya dan masalah-masalah perkotaan lain juga terus bertambah. Sekitar 1 milyar penduduk di negara-negara berkembang tidak bisa memenuhi kebutuhan perumahan, air dan kesehatan yang layak.

Karena alasan pesimis di atas, Robert McNamara (mantan presiden Bank Dunia) pernah menyimpulkan: sebesar apapun manfaat ekonomi yang dibawa oleh para pendatang baru itu akan nampak kerdil apabila dibandingkan dengan seluruh biaya atau masalah-masalah yang ditimbulkannya. Saat ini pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan yang begitu cepat telah jauh melampaui daya dukung sarana infrastruktur manusia dan fisik yang dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang efisien berlandaskan stabilitas politik dan tata hubungan sosial yang mantap. Dalam situasi seperti ini Robert McNamara memperingatkan: jangan harap kenyamanan hidup serta keramah-tamahan akan terpelihara di kalangan penduduk kota-kota.

Karena banyak masalah yang potensial ditimbulkan oleh urbanisasi atau migrasi,

maka dirasa sangat perlu akan adanya perubahan paradigma pembangunan pertanian-perkotaan. Sesuai Model Lewis di atas migrasi memperburuk ketidakseimbangan struktural desa-kota. Di sisi penawaran, migrasi internal mengakibatkan jumlah pencari kerja di perkotaan melebihi kemampuan kota menampung surplus labor dari desa. Selain itu urbanisasi melipat-gandakan tingkat penawaran kerja di perkotaan, sementara persediaan labor yang sangat bernilai di pedesaan menipis. Sedang dari sisi permintaan, penciptaan kesempatan kerja di perkotaan lebih sulit dan lebih mahal daripada penciptaan lapangan kerja di pedesaan.

Untuk mengatasi permasalahan di atas Todaro mengembangkan model baru yang dikenal dengan *Todaro Migration Model*. Model ini didasarkan atas asumsi bahwa migrasi desa-kota adalah fenomena ekonomi, dimana keputusan bermigrasi telah dirumuskan secara rasional, dan bahwa migrasi terjadi karena migran menganggap bahwa pendapatan yang diharapkan (*expected income*) di kota lebih besar dari perkiraan pendapatan di desa. Sesuai model Todaro di atas, migrasi akan berhenti jika selisih pendapatan kota dan desa mengecil.

Model di atas tak menghadapi masalah ketika diterapkan di negara industri maju, dengan asumsi bahwa perekonomian di negara-negara industri maju tersebut berada dalam posisi keseimbangan penuh (*full-equilibrium*). Tetapi kenyataan di negara-negara berkembang dengan pengangguran kronis di perkotaan, migrasi akan menambah jumlah penganggur. Ini mensyaratkan perlunya kebijaksanaan perkotaan yang lebih baik.

Beberapa implikasi kebijaksanaan Model Todaro adalah: (1) Ketimpangan kesempatan kerja kota-desa harus dikurangi; (2) Pemecahan masalah pengangguran tak cukup dengan menciptakan lapangan kerja di kota, sebab hal ini justru akan memicu urbanisasi lebih lanjut; (3) Pengembangan pendidikan yang berlebihan dari yang dibutuhkan justru memicu

migrasi dan pengangguran, dan pekerjaan rendah bakal diisi oleh tamatan akademi/Perguruan Tinggi, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan "pemborosan intelektual", (4) Pemberian subsidi upah dan penentuan harga faktor produksi (*wage*) justru akan menurunkan produktivitas.

Untuk memperoleh hasil yang lebih baik, Todaro menekankan perlunya memacu program pembangunan pertanian/pedesaan untuk mengurangi pengangguran industri/perkotaan, lewat kebijakan terpadu dengan memperhitungkan segala dampaknya terhadap sisi *demand* dan *supply* (seperti meninggikan pendapatan petani, mengem-bangkan usaha-usaha non-pertanian di pedesaan, meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan melalui penciptaan kesempatan kerja, penyediaan pelayanan kesehatan, perbaikan pendidikan, pem-bangunan infrastruktur listrik, PAM, transport). Dalam susunan kalimat yang cukup indah, Todaro (2000) menyimpulkan: Program pembangunan desa yang berhasil... nampaknya memang merupakan satu-satunya cara penyelesaian jangka panjang terhadap masalah migrasi yang berlebihan.

Dalam upaya mengantisipasi tingginya laju urbanisasi, Todaro juga memberikan "resep" kebijakan yang membuat orang tak tertarik pindah ke kota, antara lain:

- Kebijakan upah dan pendapatan
- Kebijakan harga komoditas
- Program-program peningkatan kesempatan kerja di desa
- Pengaturan kepemilikan dan peman-faatan tanah
- Alokasi kredit dan sistem perpajakan
- Peningkatan ekspor dan substitusi impor
- Kebijakan perdagangan dan devisa
- Distribusi geografis atas jasa-jasa pelayanan sosial
- Sikap terhadap investasi pemerintah dan investor asing

- Relokasi industri baru
- Program KB dan organisasi kependudukan

Tiap resep seperti diuraikan di atas jelas memerlukan kajian serta rincian yang lebih panjang, yang tentu tak mungkin dimuat satu persatu dalam *paper* ini.

Penutup

Semoga tulisan singkat ini dapat memberi "warning" pada para pengambil kebijakan akan perlunya mengantisipasi dampak ledakan penduduk yang tinggi terhadap pembangunan perkotaan, dan yang paling penting sekali dapat merancang pembangunan kota-kota yang ada di Riau sehingga mampu menghasilkan solusi dan menghindari masalah yang tidak diinginkan di kelak kemudian hari.

Daftar Kepustakaan

- Hall, P. 1992. *Urban and Regional Planning*. Routledge, New York.
- Manning, C & T N Effendi. 1985. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Gramedia, Jakarta.
- Reksohadiprojo, S & A.R.Karseno. 1997. *Ekonomi Perkotaan*. BPFE, Yogyakarta.
- Short, J R & Y H Kim.—. *Globalization and the City*. Longman.
- Suselo, H, J L Taylor & E A Wegelin. 1995. (Eds). *Indonesia's Urban Infrastructure Development Experience: Critical Lessons of Good Practice*.
- Todaro, M. 2001. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Jilid 1)*. Penerbit Erlangga. Surabaya.
- World Bank. 2000. *Cities in Transition*.
———. 2001. *The Quality of Growth*. Gramedia, Jakarta.